

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN  
SENKETA TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 79/PDT.G/2021/PN  
TPG)**

**Oleh**

**Sara Hutapea  
NIM. 190574201024**

**ABSTRAK**

Sengketa pertanahan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 79/Pdt.G/2021/PN Tpg Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sah yang kemudian mengakibatkan kecacatan sertifikat hak milik atas tanah yang dimiliki oleh Suroso sebagai Pihak Tergugat 1 (Suroso) yang dikalahkan oleh pengadilan oleh ahli waris daripada pemilik tanah yang bersengketa yakni Anoi sebagai Pihak Penggugat (Anoi). Penggugat (Anoi) beranggapan tindakan Tergugat 1 tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat (Anoi) untuk Sebagian yang menyatakan sertifikat hak milik atas nama Pihak Tergugat 1 (Suroso) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta menyatakan pengembalian hak atas tanah berdasarkan surat keterangan tanah milik Pihak Penggugat (Anoi) adalah sah demi hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2021/PN Tpg). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa studi literatur kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 (Suroso) dan Turut Tergugat 4 (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan) merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04377 dan 04378 tertanggal 31 Desember 2019 atas nama Tergugat 1 (Suroso) tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat di fakta persidangan terungkap bahwa telah adanya indikasi pemalsuan surat dalam penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat 1 (Suroso). Di sisi lain, pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari perbuatan hukum Tergugat 2 (Hok Hie) hal ini akan menyebabkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terkait status kepemilikan atas tanah yang disengketakan dalam perkara ini.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Sengketa Tanah, Perbuatan Melawan Hukum

**ANALYSIS JUDGE'S CONSIDERATIONS IN RESOLVING LAND  
DISPUTES (STUDY DECISION NUMBER 79/PDT.G/2021/PN TPG)**

**By**  
**Sara Hutapea**  
**NIM. 190574201024**

**ABSTRACT**

*The land dispute contained in the Tanjungpinang District Court Decision Number: 79/Pdt.G/2021/PN Tpg Unlawful Act was valid which then resulted in defects in the certificate of ownership of the land owned by Suroso as Defendant I who was defeated by the court by The heir of the land owner in dispute, namely Anoi, is the Plaintiff. The plaintiff believes that Defendant I's actions have committed an unlawful act. Where the panel granted the plaintiff's claim in part, stating that the certificate of ownership in the name of Defendant I did not have binding legal force and stated that the return of land rights based on the land certificate belonging to the Plaintiff was valid by law. The aim of this research is to find out the considerations of judges in resolving land disputes (Case Study Decision Number: 79/Pdt.G/2021/PN Tpg). The method used in this research is normative legal research and uses data collection techniques and tools in the form of literature study literature. The results of this research state that the judge's consideration stated that the actions taken by Defendant I and Co-Defendant IV (National Land Agency of Bintan Regency) constituted an Unlawful Act which resulted in a Certificate of Ownership Numbers: 04377 and 04378 dated 31 December 2019 in the name of the Defendant. I no longer has binding legal force in the fact that the trial revealed that there were indications of falsification of documents in the issuance of the certificate of ownership in the name of Defendant I. On the other hand, the researcher does not agree with the consideration of the Panel of Judges which did not certify the documents/deeds that issued as a result of the legal actions of ACCUSED II, this will cause there to be no legal certainty regarding the status of ownership of the land disputed in this case.*

*Keywords: Judge's considerations, land disputes, unlawful acts*